

**AKSI KAMISAN: SEBUAH TINJAUAN PRAKTIS DAN TEORITIS
ATAS TRANSFORMASI GERAKAN SIMBOLIK**

Leonardo Julius Putra, S.IP., MA
leonardojuliusputra@gmail.com

Abstraksi

Penelitian ini ditujukan untuk memahami proses transformasi salah satu bentuk aksi kolektif banalitas menjadi sebuah bentuk aksi simbolik tanpa mengabaikan tujuan utama gerakannya. Penelitian ini mengambil tempat di Jakarta dan Yogyakarta. Sebelum lebih jauh, harus dipetakan secara garis besar perihal aksi Kamisan di kedua kota tersebut. Pertama, aksi Kamisan di Jakarta menyoal pengusutan secara tuntas kasus-kasus kejahatan HAM masa lalu dengan sasaran mendesak Presiden mengeluarkan Keppres pembentukan HAM ad hoc, meski dalam aksi di depan Istana itu jamak kasus pelanggaran HAM di masa demokrasi yang diusung, hal itu sebatas manifestasi partisipasi dari transitory teams dan conscience constituency, kasus-kasus yang bukan permasalahan HAM berat masa lalu selalu silih berganti, namun kasus-kasus kunci yang melibatkan petinggi militer di masa lalu tetap bernilai tinggi untuk selalu diwacanakan. Kedua, berbeda dengan aksi Kamisan di Jakarta, gerakan simbolik di luar kota Jakarta sengaja diinisiasi dan dimobilisasi untuk sekedar menggugat ingatan kolektif masyarakat terhadap isu-isu kemanusiaan. Babak akhir, proses penelitian ini mengarahkan penarikan kesimpulan pada ketidakefektifan penggunaan strategi aksi banalitas untuk mencapai tujuan gerakan yang kondisi (status quo) semakin diperburuk dengan ketiadaan political will dari elit-elit politik untuk mengakomodir tuntutan para korban/keluarga korban kejahatan HAM masa lalu. Keyakinan dengan capaian tujuan gerakan seperti yang ditorehkan para the Mothers di Argentina mulai rapuh dari para pelaku aksi Kamisan. Strategi melawan Negara dan pertarungan kemampuan mempolitikasi isu kejahatan HAM masa lalu sedang dalam ujian yang bergerak dinamis: terkadang mencerahkan, terkadang juga memutus asa.

Kata Kunci: Aksi Simbolik, Kejahatan HAM, Pengadilan HAM ad hoc, dan Melawan Negara

Pendahuluan

Kajian tentang protes mau tidak mau selalu mengkaitkan pihak yang satu dengan pihak lain. Memang, sebagaimana dikatakan Tarrow (1994:4), protes dapat dipahami sebagai tantangan kolektif yang diajukan sejumlah orang yang memiliki tujuan dan solidaritas yang sama. Mereka melakukannya dengan motif tertentu dalam konteks interaksi tertentu secara berkelanjutan. Tidak jauh berbeda dengan Sidney Tarrow, menyitir Bert Klandermans, protes biasanya dialamatkan kepada kelompok elite, kepada lawan dan penguasa (2005:1), yang jelas protes biasanya diidentikkan dengan perlawanan dan bentuk tuntutan kepada rezim penguasa. Namun, bagaimanakah jika sebuah gerakan protes justru menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menyampaikan pesan dan menyuarakan tuntutan mereka. Terlepas dari nilai-nilai normatif dari kebanyakan bentuk protes, Kamisan atau biasa juga disebut dengan *Black Umbrella Protest* memiliki karakter gerakan tersendiri. Kajian ini mendiskusikan hal tersebut, sekaligus menggambarkan dua peta persoalan; 1.) bagaimana penguasa merespon tuntutan mereka, dan 2.) mengapa mereka memilih merubah bentuk gerakan dari gerakan banalitas menjadi gerakan simbolik.

Aksi Kamisan lebih memuat nilai perlawanan kolektif daripada rutinitas mingguan yang hanya sekedar untuk mempererat solidaritas antar sesama korban/keluarga korban pelanggaran HAM berat yang pengusutannya (dalam perspektif politis) belum tuntas hingga detik ini.¹ Lebih jauh, mereka menuntut pengusutan secara tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM serius yang terjadi di masa lalu, dan pada saat yang bersamaan juga salah satu cara untuk membuat publik tetap terjaga ingatannya atas sikap represif aparat militer yang melanggar hak-hak sipil dan politik. Ciri khas yang membedakan aksi Kamisan dengan bentuk aksi protes lainnya terletak pada durabilitas aksi yang tinggi, aktor yang sama dari waktu ke waktu, keteraturan waktu terkait keberlangsungan aksi protes, konsistensi isu/tuntutan yang diperjuangkan di dalamnya dan cara/metode penyampaian tuntutan.

Berbicara tentang durabilitas aksi protes yang dikemas dalam aksi Kamisan, tidak banyak yang tahu bahwa protes ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dengan tuntutan yang selalu sama, pun dengan aktor yang bermain di dalamnya. Maria Katarina Sumarsih, Suciwati Munir dan Bedjo Untung menjadi tokoh penggerak protes payung hitam untuk pertama kalinya, sejak hari Kamis tanggal 18 Januari 2007, mereka dan beberapa keluarga korban pelanggaran HAM di masa lalu lainnya seolah tidak pernah kehabisan tenaga dan putus harapan menuntut pengusutan tuntas kematian keluarga mereka atau pun anggota keluarga yang tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.

Awal mula kemunculan aksi Kamisan bisa saja sarat akan kepentingan pribadi Maria Katarina Sumarsih, dkk, namun seiring berjalannya waktu dan semakin banyak harapan-harapan dari keluarga korban pelanggaran HAM berat kepada Negara yang tidak juga menemui titik terang, menjadikan aksi Kamisan tidak lagi bijak jika diidentikkan dengan kepentingan mereka semata.

Sejarah mencatat, setidaknya ada tiga keluarga korban pelanggaran HAM berat yang menjadi pelaku aksi Kamisan, mereka juga tergabung dalam presidium JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan) : (1.) Maria Katarina Sumarsih, orang tua dari Bernardus Realino Norma Irawan, salah satu mahasiswa yang tewas dalam Peristiwa Semanggi 1, (2.) Suciwati Munir, istri

¹Akses dari <http://www.thejakartaglobe.com/editorschoice/for-indonesias-kamisan-the-demand-and-wait-for-justice-only-grows/518500>, dirilis juga dalam <http://www.ucanews.com/news/an-indonesian-mothers-long-fight-for-justice/68373>, akses pada Desember 2013.

mendiang pegiat HAM, Munir Said Thalib, dan (3.) Bedjo Untung, perwakilan dari keluarga korban pembunuhan, pembantaian dan pengurungan tanpa prosedur hukum terhadap orang-orang yang diduga anggota PKI pada tahun 1965-1966.² Benang merah yang dapat ditarik dari ketiga aktor tersebut adalah dari kesamaan terduga pelaku pelanggaran HAM di masa lalu, yaitu militer.

Menyinggung motif kemunculan aksi Kamisan, maka terlihat jelas bahwa motif politik berupa mendesak rezim penguasa untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM --baik yang terjadi selama rezim Orde Baru maupun di era pasca Reformasi— dan upaya menjaga ingatan kolektif tentang kejahatan HAM berat sedang digaungkan. Terlebih jika kita melihat hasil wawancara dengan Maria berikut:³

*“The Parliament has been conquered by the old politics. The New Order regime is now back in power. That means, for Trisakti, Semanggi I and II, although personally many members of the parliament were supportive to resolve them, institutionally they would vote against it... *So, the parents of the victims thought] Come on, we are tired, so how about doing a silent protest. We bring posters, banners like that, so that people would know that human rights violations in Indonesia were not addressed well.” (Maria Katarina Sumarsih, interview, November 2007)”*

Terlihat jelas Negara tidak menunjukkan keseriusan dan komitmen menyikapi kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, dan cenderung membuat publik lupa pada persoalan penegakan keadilan HAM dengan tidak merancang mekanisme pengadilan HAM, hal ini dapat dilihat dari ketidakjelasan yang diungkap ke publik tentang siapa aktor intelektual untuk melenyapkan pihak-pihak yang berseberangan dengan rezim penguasa dan otak utama pelanggaran HAM, selain itu hukuman yang ditimpakan kepada pelaku pelanggaran HAM (pada umumnya para prajurit jenjang bintara) juga tidak sebanding dengan pelanggaran yang mereka perbuat kepada para korban. Bahkan dalam kasus kematian aktivis HAM, Munir, publik dibingungkan dengan proses hukum pelaku lapangan yang hanya seorang pilot.

Maria Katarina Sumarsih, Suciwati Munir, dan Bedjo Untung merupakan catatan kelam pengusutan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, mereka adalah titik puncak gunung es yang jika disibak lebih mendalam justru semakin memperlihatkan keabaian pemerintah dalam menjamin keadilan, perlindungan dan penegakan HAM. Penelitian ini menjadi penting mengingat selama ini literatur yang membahas aksi protes selalu bertolak dari bentuk-bentuk aksi protes kebanyakan (banalitas), di mana para pemprotes identik dengan kekerasan, berlangsung dengan durabilitas yang singkat, spontan dan tidak teratur, serta perhatian terhadap motif aksi protes yang kerap multitafsir.

A. Literature Review

Pada dasarnya, studi-studi yang menganalisa hubungan antara lahirnya aksi protes dengan ketidakpuasan terhadap sebuah keadaan/kondisi oleh sekelompok orang telah banyak diklasifikasi. Namun sejauh ini penulis belum menjumpai literatur yang secara gamblang mengupas kaitan aksi

²Sebagaimana yang terekam dalam video dokumenter, video tersebut merekam insiden bentrokan antara pelaku aksi protes payung hitam, simpatisan dan koordinator lapangan aksi protes dengan pihak keamanan (Polri dan Paspampres) pada tahun 2011. Tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada aktor-aktor lain yang tidak sempat terekam dalam video dokumenter tersebut, namun bergerak dalam gerakan yang sama.

³ Petikan hasil wawancara ini, penulis kutip dari artikel yang ditulis oleh Rita Padawangi, 2011, *Reform, Resistance, and Empowerment: The Transformation of Urban Activist Groups in Jakarta, Indonesia, 1998-2010*, Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore. Artikel ini juga dipresentasikan dalam International Sociological Association – Research Committee 21, University of Amsterdam, 7-9 July 2011.

protes dengan isu penuntasan HAM, apalagi gerakan protes yang dominan menonjolkan simbol-simbol tertentu.

Keterbatasan literatur yang ada hanyalah berbicara tentang protes sebagai kajian psikologi-sosial, dan kalau pun terdapat gagasan gerakan kolektif seputar isu tertentu, isu lebih mengarah pada pertarungan kelas sosial (pergerakan buruh, protes petani, gerakan mahasiswa) antara masyarakat dengan Negara. Selain itu, keterbatasan lain dari literatur sekedar memaparkan *timeseries* pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia, dan belum menyentuh sisi bagaimana perjuangan korban/keluarga korban/kolega/aktivis dalam menuntut penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM entah itu melalui gerakan protes, maupun dengan saluran-saluran alternatif lainnya.

Kajian tentang protes pernah diangkat oleh Sartono Kartodirdjo (1973). Dengan locus penelitian di Jawa, dan mengangkat isu agraria sebagai arena dominan di mana sebagian besar aksi-aksi protes pada abad 19 dan 20 berlangsung. Jawa dipilih menjadi locus penelitian karena memang derajat perbedaan status *socio-cultural* antar daerah dan masyarakat Pulau Jawa tidak terlalu besar, sehingga perbandingan karakteristik aksi protes yang dipengaruhi status *socio-cultural* bukan menjadi variabel independen, di samping itu kajian Sartono ini menjadi fondasi/pendekatan kerangka berpikir untuk menjelaskan struktur ekonomi, sosial dan politik Indonesia secara keseluruhan dan memberikan kontribusi untuk mengkonstruksi titik pusat dalam memandang sejarah Indonesia.

Kenyataan lain yang menjadi temuan dalam penelitian Sartono Kartodirdjo adalah lahirnya aksi protes di Pulau Jawa dalam rentang abad ke-19 sampai 20 tidak terlepas dari pengaruh nilai-nilai klasik, yaitu jejak-jejak peninggalan masa penjajahan dan juga "perselingkuhan" kekuasaan pemimpin agama (Kyai). Gerakan protes pada masa itu selalu identik dengan perlawanan kaum petani dengan pemerintah kolonial Belanda dalam hal kepemilikan tanah dari penduduk asli, sistem bagi hasil, dsb. Pun dalam banyak kasus yang berkaitan dengan pemimpin agama (Kyai), keadaan masyarakat Jawa yang mayoritas memeluk agama Islam dan kecenderungan fanatik dengan para pemimpin agama, membuat masyarakat Jawa sangat rentan dengan bentuk kekerasan horizontal atas nama kesetiaan kepada pemimpin mereka.

Secara lebih spesifik, Sartono memakai 5 aspek analisa dalam memahami gerakan protes petani pedesaan di Jawa: (a) struktur ekonomi dan politik masyarakat pedesaan pada abad 19 dan 20, (b) basis massa dari sebuah gerakan sosial, (c) kepemimpinan dalam gerakan sosial, (d) ideologi gerakan sosial, dan (e) kondisifitas budaya masyarakat di mana gerakan sosial berlangsung.

Hal di atas yang menjadi motif utama lahirnya sebuah gerakan aksi protes ---baik aksi protes damai dan bentrokan berdarah---, bagi Sartono tidak bisa dilepaskan dari masalah perubahan struktur masyarakat Jawa yang sering dipantik dengan perebutan dan persaingan kekuasaan antar elit yang bersumber dari proses transformasi struktural dari struktur politik dan ekonomi tradisional mengarah pada struktur politik ekonomi kolonial dan modern. Instrumen ideologi dan peran pemimpin agama pada masa itu menjadi otentifikasi perubahan sosial yang tercermin dalam aksi protes, terutama pergolakan yang terjadi dalam masyarakat petani pedesaan.

Tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Sartono, Vincent Boudreau (2004) mengangkat isu protes pada arena, scope yang lebih luas, namun dengan motif yang lebih sempit. Boudreau dengan sangat provokatif membandingkan pola resistensi sosial dari masyarakat 3 Negara (Burma, Indonesia dan Filiphina) terhadap rezim penguasa (Ne Win, Suharto dan Ferdinand Marcos) yang dimunculkan lewat aksi-aksi protes.

Dalam perbandingan itu, Vincent mengetengahkan gagasan bahwa di Negara-negara authoritarian, aksi protes terhadap rezim penguasa merupakan konsekuensi dari sikap represif Negara kepada warganya, di mana cara-cara *indirect method* (aksi non-protes) untuk bernegosiasi dengan rezim penguasa tidak menemukan celahnya, menjadikan aksi protes dipandang sebagai cara/metode yang ampuh untuk memberikan perlawanan melalui gerakan kolektif masyarakat sipil.

Selain itu Boudreau juga banyak membahas pola dan peluang gerakan aksi protes di bawah rezim authoritarian represif, karena aksi protes juga dipahami sebagai bentuk komunikasi antara rezim penguasa dengan aktivis pro Demokrasi. Terselip pemikiran yang menggiring objek pergerakan dipengaruhi oleh corak pemerintahan dan kekuatan sosial dari suatu Negara. Belajar dari ketiga Negara tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan aksi protes, diantaranya adalah mobilisasi yang baik dalam sebuah gerakan, dipimpin oleh pemimpin kharismatik dan menemukan momentum yang tepat, sebagaimana yang dikatakan oleh Boudreau:

“naturally, contention in the case will respond to some common triggers. Philippine, Indonesia and Burmese democracy movement, for instance, display some similar element, which may help to explain the occurrence of anti-regime mobilization. A charismatic female leader led each, each unfolded during periods of economic crisis, and each opposed a regime under increasing international pressure”.

Lain di Negara Barat, lain pula yang terjadi di Negara-negara Asia Tenggara. Di Negara-negara post-kolonial, terutama saat memasuki era transisi, aksi protes didorong oleh mobilisasi massa yang begitu luas dan juga dibarengi usaha untuk mereduksi kapasitas Negara, dengan kata lain Negara sedang menghadapi tantangan sosial yang tidak sekedar menuntut suatu nadzar politik, tetapi juga berusaha mengurangi peran sentral Negara. Terkait dengan gagasan tersebut, sejumlah literatur justru membedah wacana alternatif, bentuk protes dan taktik gerakan massa didorong oleh kemunculan institusi Negara dan perkembangan jaringan sosial. Charles Tilly contohnya, mengilustrasikan suatu keadaan di mana parlemen Inggris mendorong dan mendukung para demonstran untuk menggelar aksi di pusat kota, daripada menggelar aksi protes mereka pada ranah lokal.

Secara bersamaan, jika kita berbicara tentang peluang terciptanya mobilisasi sosial untuk aksi protes, bagi Boudreau hal ini tidak bisa dilepaskan dari model-model struktur ketegangan politik. Sebuah pemahaman yang didasarkan pada hasil pengujian dari analisa perubahan pelembagaan institusi-institusi Negara yang sedang memasuki tahapan *state building*.

Perubahan-perubahan struktur politik yang relatif cepat juga dapat mempengaruhi peningkatan atau penurunan peluang politik untuk memobilisasi massa. Sehingga dalam literatur Vincent Boudreau ini, obsesi dari gerakan-gerakan aksi protes di Negara-negara post-kolonial adalah perkara bagaimana melawan rezim penguasa diktator yang represif dan mendorong demokratisasi di ketiga Negara tersebut.

Kajian David W. Plath, dkk (2001), juga menarik untuk diperhatikan. Dalam satu bab khusus “Alternatif Ganda, Protes Negro di Amerika Perkotaan pada tahun 1968”, Michael Lewis secara dramatis mengangkat kisah perjuangan kelompok Negro Amerika perkotaan untuk mendapatkan haknya di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, keamanan dan hak-hak politik mereka yang selama lebih dari 300 tahun diabaikan –bahkan dikucilkan-- oleh mayoritas kulit putih Amerika.

Perjuangan kelompok Negro ini dilatarbelakangi dalam *setting* wilayah Selatan (wilayah kumuh, miskin dan terkucilkan dari suasana perkotaan) yang ditinggali oleh kelompok Negro dan wilayah Utara (metropolitan) sebagai tempat tinggal mayoritas warga kulit putih.

Secara institusional, kelompok Negro di Amerika melakukan aksi protes dalam wadah pergerakan organisasi (*organizational movement*), NAACP dan National Urban League merupakan dua organisasi besar yang menjadi advokat paling suar mewakili minoritas Negro pada awal 1900'an, sementara itu NAACP dan National Urban League secara umum telah diakui oleh mayoritas kulit putih sebagai wadah advokasi yang solid untuk memperjuangkan kepentingan kelompok Negro.

Ada cara yang berbeda dari kedua organisasi besar ini dalam memperjuangkan hak-hak kelompok Negro di Amerika, mereka tidak sekedar melakukan protes turun ke jalan untuk menyuarakan kepentingan kelompok Negro, organisasi ini sebaliknya beroperasi sebagai suatu skema pelayanan sosial dengan mengkhhususkan diri pada penekanan pembukaan kesempatan kerja untuk tenaga kerja Negro, kesamaan ekonomi dan pelayanan sosial.

Sama halnya dengan organisasi UNIA (*Universal Negro Improvement Association*) yang dipimpin oleh seorang Indian Barat berkulit hitam, Marcus Garvey. Hingga kerasnya tekad Garvey memperjuangkan nas ituib dan kesetaraan hak kulit hitam dengan kulit putih di Amerika pada saat, dikenal aliran pemikiran Garveyisme yang inti ajarannya adalah mengembalikan kejayaan kulit hitam dan menempatkan kebanggaan kulit hitam sebagai identitas murni dari semua jenis ras manusia.

Seiring dengan berjalannya waktu hingga saat ini, di mana permasalahan semakin beragam seputar ras, justru semakin banyak memunculkan organisasi-organisasi serupa di atas yang melawan segala bentuk penindasan dan diskriminasi kelompok minoritas oleh kelompok mayoritas, termasuk desakan untuk mengubah kebijakan yang tidak berpihak kepada kalangan minoritas.

Aksi protes lintas motif dan periode di atas dielaborasi dengan sangat mendetail dalam kajian Aderito de Jesus Soares, dkk, (1997) dengan meletakkan isu HAM sebagai objek kajian. Secara umum literatur ini membentangkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat militer terhadap masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, namun ada satu *chapter* yang cukup menarik untuk dikaji ulang, yaitu terkait dengan sikap represif aparat militer dalam merespon munculnya aksi-aksi kolektif berupa protes di tahun 1996 dan strategi kolektif dari kelompok tertentu untuk meredam sikap represif aparat militer.

Analisa itu menyoal intervensi militer dalam dunia politik praktis dan dualisme kepemimpinan dalam tubuh PDI antara loyalis Megawati dengan pendukung mantan Ketua Umum DPP-PDI hasil Kongres Medan, Soerjadi dan Fatimah Achmad di tahun 1990'an yang sering menjadi *proximate factor* dari aksi-aksi protes yang berujung pada bentrokan berdarah antara sipil dan militer. Bisa dikatakan bahwa aksi protes yang selalu diakhiri dengan bentrokan berdarah ini ditunggangi oleh kepentingan politik praktis militer untuk membungkam kekuatan para loyalis Megawati di PDI dengan mendukung dan menjadi aktor di belakang meja Kongres Medan.

Ada banyak rangkaian kejadian dari aksi kolektif kubu Megawati sebagai respon atas intervensi militer dan pemerintah di balik Kongres Medan, layaknya bom waktu, akan selalu ada titik klimaks di mana aksi kolektif berupa protes berubah menjadi sebuah gerakan destruktif yang bergerak liar. Salah satunya dapat dilihat dari aksi *long-march* yang dilakukan oleh ribuan pendukung Megawati dan sejumlah tokoh-tokoh pro-demokrasi lain seperti Sri Bintang Pamungkas (PUDI) dan Sunardi (mantan ketua Gerakan Marhaen) dengan tujuan memprotes pelaksanaan

Kongres Medan yang akan dilaksanakan pada tanggal 19-21 Juni 1996 karena tidak sesuai dengan AD/ART internal PDI.

Namun, aksi damai *long-march* tersebut harus diwarnai kekerasan saat gabungan militer bersenjata mencoba menghalau aksi mereka, yang kemudian hari insiden tersebut dikenal dengan “Insiden Gembira”, karena memang insiden berdarah itu terjadi di pertigaan Jl. Gondangdia, Jakarta.

Tekanan demi tekanan dari pihak militer kepada Megawati dan pengikut setianya semakin membesar menyusul kejadian Insiden Gembira tersebut. Seolah tak ingin tinggal diam dengan sikap represif dan ancaman militer, para loyalis Megawati yang tergabung dalam Satgas-satgas dari seluruh Indonesia justru memberikan perlawanan yang jauh berpengaruh kuat terhadap ideologi loyalis PDI dan publik, namun perlawanan ini dikemas dengan sangat rapi dan tidak pernah terbayang aksi kekerasan di dalamnya. Melalui strategi perlawanan Mimbar Bebas yang berpusat di DPP-PDI Jl. Diponegoro,⁴ loyalis Megawati mendirikan panggung di halaman gedung di mana setiap orang tanpa membedakan latar belakang, status sosial, ekonomi dan politik diberi kesempatan untuk berpidato di atas panggung.

Mulai dari anggota DPR/MPR RI, mahasiswa, aktivis, kalangan buruh, pedagang kaki lima, ibu rumah tangga, hingga pengangguran diperbolehkan berpidato terkait semua isu, seperti kepemimpinan Megawati, upah buruh yang rendah, kesenjangan sosial dan ekonomi, korupsi yang merajalela, pengusuran, hingga meluapkan kebencian atas sikap represif militer, membumi di Mimbar Bebas tersebut.

Aksi dalam Mimbar Bebas yang sedianya sebagai medium *soft power* untuk meredam aksi represif aparat militer, justru semakin memancing kemurkaan militer Indonesia. Pejabat tinggi TNI bahkan menuding Mimbar Bebas sebagai embrio makar dan oleh karena itu harus dihentikan. Strategi perlawanan dari kubu loyalis Megawati akhirnya berada pada titik keberhasilan, Mimbar Bebas mulai dipahami sebagai gerakan ideologis menentang rezim otoriter Orde Baru dan militer. Bahkan sejumlah pengamat sejarah dan politik mengatakan bahwa Mimbar Bebas ini merupakan fenomena yang sangat unik di zaman Orde Baru, mengingat selama lebih 20 tahun Soeharto berkuasa, pemerintah Orde Baru menciptakan mistifikasi arti tentang partisipasi rakyat.

Selama rezim Orde Baru berkuasa, manifestasi kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat selalu identik dengan ritual Safari Ramadhan, Kelompencapir, Doa Politik, dsb. Mimbar Bebas secara mengejutkan membongkar mistifikasi yang dibuat oleh rezim Orde Baru tersebut, Mimbar Bebas mengembalikan watak demokrasi yang dicita-citakan oleh *The Founding Fathers*, yaitu menempatkan kembali rapat umum (*openbare vergadering*) sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan suara dari masyarakat luas secara bebas dan lepas dari rasa takut di bawah ancaman militer rezim Soeharto.

Telah penulis paparkan sejumlah literatur-literatur yang berbicara tentang aksi protes. Entah itu aksi protes yang dilihat dari motif kemunculannya, peluang lahirnya aksi protes, strategi perlawanan lewat protes dan tujuan-tujuan aksi protes itu sendiri. Namun bagi penulis, literatur-literatur di atas masih memiliki keterbatasan-keterbatasan teoritik dan membuka peluang bagi penulis untuk mengisi celah kosong teoritik tersebut. Kajian Sartono misalnya, melihat strategi perlawanan kaum petani melalui aksi protes pada masa kolonial Belanda tidak relevan lagi digunakan untuk menganalisa aksi-aksi protes pasca-kolonial Belanda hari ini, mengingat

⁴ Tempat ini dipilih mengingat beredar kabar bahwa DPP-PDI akan diambilalih kepengurusannya oleh pendukung Konres Medan, selain itu sebagai upaya untuk menjamin aktivitas di DPP-PDI berjalan seperti biasanya di bawah kepemimpinan hasil Musyawarah Nasional, Megawati.

paradigma Indonesia sebagai Negara agraris telah bergeser ke paradigma industrialis yang juga turut mempengaruhi peluang lahirnya aksi protes dari kaum petani.

Pemikiran Scott (1994) yang menyatakan bahwa petani merupakan golongan rakyat kecil yang mengutamakan prinsip "*safety first*", tampaknya tidak akan meniru cara-cara yang dilakukan oleh *Black Umbrella Protest* dalam menyampaikan tuntutan, terlebih jika itu merupakan upaya-upaya untuk mengubah sebuah kondisi atau mengkritik kebijakan rezim penguasa. Tidak jauh berbeda dengan literatur Vincent Boudreau, dia melupakan bagaimana peluang politik yang mendukung lahirnya aksi protes itu tercipta, atau dengan kata lain, dinamika politik dan sosial yang mengkerangkai kemunculan aksi protes tidak tergambar secara jelas dalam kajiannya.

Hemat penulis, dua literatur terakhir dari David W. Plath, dkk, serta Aderito de Jesus Soares, dkk, memiliki garis kesamaan dengan rencana penelitian *Black Umbrella Protest* ini, yaitu terletak pada isu dan target aksi protes. Kedua literatur tersebut sama-sama menyoal permasalahan HAM yang menimpa warga negaranya dan menysasar pada kelambanan –bahkan ketidakmampuan— Negara mengakomodir kepentingan hak-hak asasi manusia dari warga negaranya. Namun yang menjadi pembeda dengan *Black Umbrella Protest* ini kelak adalah penggunaan simbol-simbol di dalam protes itu sendiri.

Black Umbrella Protest bukanlah bentuk aksi spontanitas dengan durabilitas yang singkat, terkesan *random* dan tidak memiliki keteraturan terkait berlangsungnya aksi protes. Membidik alasan mengapa mereka memilih cara-cara penyampaian gagasan dalam *Black Umbrella Protest*, tentu bertolak belakang dengan kedua literatur terakhir di mana protes selalu diidentikkan dengan hingar-bingar menyuarkan tuntutan dan memiliki potensi destruktif berdarah jika tidak dipelihara dengan baik. Karakteristik dan metode penyampaian gagasan dalam *Black Umbrella Protest* tidaklah sebanding dengan gerakan-gerakan spontan lainnya, keunikan dan kekhasannya melampaui kewajaran dari sekedar tindakan kolektif terorganisir biasa, inilah sebuah gerakan simbolik.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang mendalam yang tersembunyi di bawah permukaan antara peneliti dan fenomena yang diteliti. Dengan kekhasan metode ini diharapkan dapat membongkar tabir dan menangkap sesuatu yang dimaknai dari sebuah fenomena sosial, sehingga makna dari fenomena tersebut dapat dipahami dengan lebih mudah dan sederhana.⁵

Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus atau *case study*. Model atau pendekatan ini memfokuskan pada satu kasus atau lebih dalam fenomena sosial. Menurut Creswell (dalam Haris, 2012), pendekatan *case study* menekankan pada eksplorasi dan suatu sistem yang terbatas pada satu kasus atau lebih secara mendetail, disertai dengan penggunaan data secara mendalam, beragam dan kaya akan konteks.⁶ Secara lebih dalam, *case study* bersifat komprehensif, intens dan mendalam, memberi penekanan pada fenomena yang bersifat kontemporer.

⁵Denzin dan Lincoln (1994) dalam Herdiansyah, H. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012, hal 7-9

⁶Ibid, 76

Lokasi penelitian

Studi ini akan dilakukan di wilayah Jakarta. Riset lapangan yang akan dilakukan nanti tentunya akan disesuaikan dengan kebutuhan data yang diperlukan oleh peneliti. Artinya, lokasi tidak akan selalu dilakukan di Jakarta, namun peneliti akan bergerak ke daerah lain karena aksi Kamisan mulai merambah di beberapa kota seperti Kota Yogyakarta.

Teknik pengumpulan data

Studi ini diyakini akan sangat membutuhkan banyak data dari bermacam narasumber yang ada. Selain menekankan pada kejadian-kejadian dan data yang sifatnya kontemporer, studi ini juga bergantung pada fakta-fakta historis. Tentunya dengan penggunaan data berdasarkan dimensi periode waktu tersebut, proses penelitian membutuhkan teknik pengumpulan data dan analisis yang beragam. Hal tersebut bertujuan untuk mengelaborasi keberagaman data yang diperoleh peneliti, dan dari itu peneliti dapat melakukan pengujian silang antar data yang ada. Berikut langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka pengumpulan data dari penelitian ini:

- a. **Dokumentasi**
- b. **Field Reserch (live-in) → observasi partisipan dan *indepth interview***

Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan dalam penelitian yang memiliki fungsi yang sangat penting, untuk mendapatkan keabsahan dari hasil sebuah penelitian. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa deskriptif, dimaksudkan untuk eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial yang didapat dari data yang telah dikumpulkan, kemudian disusun dan dijelaskan dengan lebih sistematis.⁷

Tahapan selanjutnya adalah mereduksi (meringkas data dalam berbagai bentuk) berdasarkan pola-pola atau kriteria tertentu yang memiliki kesamaan. Setelah seluruh data (dari seluruh teknik pengumpulan data yang digunakan) telah direduksi, langkah selanjutnya adalah validasi data-data tersebut dengan metode *triangulasi*. Secara sederhana metode *triangulasi* dapat disimpulkan sebagai metode pengumpulan data dengan banyak cara dan sudut pandang.

Dengan kata lain peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber data, satu metode pengumpulan data. Dengan harapan data yang diperoleh dari banyak sudut pandang tersebut akan diperoleh beragam fenomena yang muncul, dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan yang lebih *firm* dan bisa diterima kebenarannya. Tahapan terakhir adalah tahapan penarikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis data dan validasi data yang dilakukan sebelumnya, sehingga didapat kebenaran dari fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat.

C. Hasil

Narasi dari Argentina: Inspirasi Aksi Kamisan Indonesia

Nasib yang menimpa masyarakat dan para aktivis di Argentina dan Indonesia di masa lalu itu tidak bisa dilepaskan dari karakter kedua Negara yang menempatkan militer sebagai *hyperactive brigade*, sebuah terminologi yang merujuk pada kendali penuh militer terhadap jalannya seluruh roda pemerintahan, seperti juga Myanmar, Amerika Latin, dan Korea Utara hari ini.

Sehingga alasan keamanan dan ancaman terhadap stabilitas Negara seringkali digunakan dengan sekenak hati oleh rezim penguasa untuk membungkam kekuatan-kekuatan politik oposisi, sekali pun harus menculik dan menghilangkan nyawa pihak-pihak yang bersebarangan dengan rezim penguasa. 24 Maret 1976 mungkin menjadi hari terburuk dalam dinamika perpolitikan di

⁷Masri, Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989, hal 39.

Argentina dengan menyalanya “lampu hijau” bagi rezim militer untuk berkuasa. Setelah sebelumnya pada saat itu junta militer melakukan kudeta terhadap Presiden Isabel Perón.

Kekejaman aparat militer justru memunculkan pergolakan batin dari para Ibu korban pelanggaran HAM berat, untuk mencari tahu nasib anak dan anggota keluarga mereka, pada tanggal 30 April 1977, sejumlah Ibu-ibu dari anak dan anggota keluarga korban penculikan dan pembunuhan berkumpul di Plaza de Mayo yang terletak di sekitar pusat pemerintahan Argentina, Buenos Aires.

Mereka memulai aksi simbolik dengan berjalan kaki mengitari piramida Plaza de Mayo dengan mengenakan penutup rambut berwarna putih bertuliskan nama anak-anak mereka yang menjadi korban, sambil membawa foto, spanduk, poster dan atribut propaganda lainnya untuk menarik perhatian publik, cara ini dipilih karena dinilai paling aman mengingat rezim militer sangat menentang segala bentuk wacana aksi dan tak ragu membubarkan kumpulan orang-orang yang diidentifikasi menebarkan benih-benih paham perlawanan kepada rezim militer.

Sikap represif dan resistensi rezim militer tidak menyurutkan semangat para Ibu korban yang umumnya dari kalangan sosial kelas bawah untuk tetap melaksanakan ritual tiap hari Kamis tersebut, gelombang simpati publik bergerak seperti bola salju semakin harinya. Para pelaku aksi datang dari berbagai latar belakang pendidikan, strata sosial yang berbeda, agama yang plural dan afiliasi politik yang beragam juga, tidak ada identitas yang dapat melekatkan heterogenitas mereka selain kesamaan nasib dan bentuk simpati kepada Ibu-ibu korban. Gerakan perempuan yang membuka ruang romantisme antara Ibu dan anak di Plaza de Mayo itu sekaligus mendekonstruksi pandangan terhadap perempuan di Argentina, momentum peralihan gerakan sosial yang mulanya didominasi oleh kaum pria bergerak ke dimensi kuasa gerakan perempuan modern.⁸

Menyebarkan Benih Gerakan Perlawanan

Kondisi yang muncul sebagai konsekuensi dari hubungan kausal antara penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Negara dengan sikap individu yang merespon kejadian dan peristiwa itu secara langsung telah mendorong paham-paham perlawanan dalam tatanan sosial. Untuk itu, menilik gagasan yang dikemukakan oleh George Ritzer (1979), Blumer (1969) tentang gerakan kolektif dan sifat/karakter yang melekat di dalamnya, sudah cukup representatif untuk mengantarkan pemahaman awal atas munculnya ide gerakan perlawanan kepada Negara dari korban/keluarga korban kejahatan HAM berat masa lalu.

Awal mula sikap dan upaya melawan kondisi yang sudah ada tersebut bisa saja sebatas hadir dalam skope diri individu, namun dalam banyak kasus selalu teruji berkembang menjadi gerakan kolektif. Apalagi jika perlakuan penyalahgunaan kekuasaan oleh Negara terjadi pada sekelompok orang, tidak butuh waktu lama untuk menumbuhkan gerakan perlawanan kolektif. Konsep semacam itu yang sempat dipraktikkan oleh korban/keluarga korban kejahatan HAM masa lalu tidak lama setelah jatuhnya rezim Soeharto tahun 1998, menggejalanya ide perlawanan sangat mungkin untuk lahir di tengah-tengah masyarakat karena struktur peluang politik di masa itu memang mendorongnya.

Bisa dikatakan, kilas balik kejadian-kejadian di awal reformasi dan masa transisi pemerintahan Soeharto ke tangan B.J. Habibie tahun 1998, merupakan masa-masa kritis bagi sisi kemanusiaan. Penculikan aktivis pro demokrasi 1997/1998, pembunuhan para pemimpin gerakan perubahan, penembakan mahasiswa oleh aparat militer, dan jatuhnya ribuan korban jiwa dari

⁸ Dimuat dalam <http://www.womeninworldhistory.com/contemporary-07.html>

masyarakat sipil dalam aksi kerusuhan, mengawali perjuangan penuntasan kasus-kasus kejahatan HAM masa lalu. Namun demikian, sangat sulit untuk mengetahui apakah semua kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu telah diusut secara tuntas atau justru hilang ditelan sejarah.

Apa yang para korban/keluarga korban perjuangkan lewat aksi-aksi banalitas di atas ternyata tidak membawa ke arah perubahan yang lebih baik, bahkan keabaian Negara (Presiden dan lembaga-lembaga Negara) dengan kasus mereka semakin menjadi-jadi dengan tidak melanjutkan produk hukum yang sedianya dirancang untuk menuntaskan kasus-kasus kejahatan HAM berat masa lalu. Keberadaan undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diperkuat dengan disahkannya undang-undang nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sebuah pelaksanaan produk hukum yang kelak dijadikan semangat dalam aksi Kamisan.⁹ Undang-undang di atas dibuat untuk memungkinkan proses peradilan dapat berjalan secara akuntabel dan transparan, karena proses peradilan bukan diselenggarakan secara tertutup dalam ruang lingkup suatu kedinasan, tetapi dalam wilayah peradilan umum.

Mengidentifikasi Kegagalan Gerakan Banalitas

Faktor Internal

Dalam kajian gerakan sosial, para ilmuwan bersepakatan bahwa sebuah gerakan dapat saja gagal dengan membubarkan diri di tengah jalan, atau mengubah strategi, bentuk dan tujuan gerakan, sejalan dengan dinamika internal gerakan. Dinamika internal dalam konteks ini merujuk pada perkembangan sebuah gerakan yang sangat dipengaruhi oleh keadaan pendukung berupa keputusan-keputusan para individu di dalamnya, seperti membangun kepentingan dan solidaritas bersama (*collective interest*), memilih pemimpin gerakan yang dipercaya memiliki pengaruh besar terhadap pihak lawan, merumuskan ideologi gerakan dengan tujuan menarik simpati massa, merintis organisasi untuk mempermudah mobilisasi sumber daya gerakan, dsb.

Periode delapan tahun aksi banalitas yang pernah diterapkan menambah satu lagi dari sekian banyak koleksi kegagalan gerakan repertoar. Ada banyak perspektif teoritik dan bangunan data yang coba menguak penyebab perubahan bentuk aksi ini, salah satu yang menarik adalah dengan melihat perubahan, jenis dan derajat partisipasi para pelaku di dalamnya, yang secara garis besar telah dikemukakan oleh Harry H. Hiller (1975). Pada tataran pemikiran itu, Hiller semakin memperkuat keyakinan para ilmuwan sebelumnya yang secara jelas menyatakan bahwa kegagalan sebuah gerakan sosial sehingga mengharuskan mereka mengubah bentuk aksi dan mereformulasi tujuan gerakan atau membubarkan diri, acap kali lebih disebabkan oleh faktor internal gerakan, ketimbang faktor dari luar.

Sebuah periode dilematis antara keinginan untuk tetap memperjuangkan kasus-kasus kejahatan HAM berat masa lalu dengan tindakan protes turun ke jalan, atau justru membiarkan hak-hak korban/keluarga korban hanyut dalam arus sejarah lalu berdamai dengan Negara, sempat membayangi perjalanan gerakan para pejuang HAM ini. Rentetan perbendaharaan aksi kolektif banalitas (sebelum mengubah bentuk aksi ke aksi simbolik Kamisan) Maria Katarina Sumarsih, dkk, ternyata tidak membawa kemajuan yang signifikan terhadap tuntutan mereka. Keadaan ini

⁹ Wawancara dengan Maria Katarina Sumarsih di kediamannya, April 2014. Hasil wawancara tersebut menggiring pada kesimpulan bahwa orientasi dan tujuan gerakan banalitas adalah pelaksanaan secara utuh atas UU No. 26 Tahun 2000. Jika pengadilan HAM ad hoc sudah terbentuk, aktor intelektual pelanggaran HAM saat masa transisi (Wiranto dan Prabowo) dapat diproses secara hukum.

memunculkan sebuah pertanyaan mendasar: permasalahan dan tantangan seperti apa yang melekat pada gerakan-gerakan kolektif yang sudah ada sebelumnya sehingga tidak bertahan lama? Dari pemetaan besar, ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh penulis:

a. Hambatan Proses Konsolidasi Gerakan

Derajat partisipasi dari partisan gerakan memegang peran kunci atas berhasil dan tidaknya tujuan gerakan. Individu-individu dengan latar belakang, kondisi dan kepentingan yang berbeda menghimpun diri untuk mengakulturasikan tujuan bersama. Namun dalam perjalannya, perbedaan derajat sosial dari para partisan di dalamnya justru bisa menjadi duri dalam daging gerakan jika komitmen tidak lebih besar daripada ketidakseragaman tersebut, hal itu pula yang terjadi pada korban/keluarga korban kejahatan HAM serius dalam perjuangannya.¹⁰ *Pertama*, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (tingkat intelektual dan ekonomi) dari pejuang sipil HAM senyatanya menjadi tantangan tersendiri bagi mereka untuk tetap solid dan memegang komitmen bersama hingga tuntutan mereka tercapai.

Tidak jarang terjadi salah paham di antara mereka dalam menafsirkan sebuah isu gerakan, contohnya saat keluarga korban berhadapan dengan tawaran rekonsiliasi oleh tim khusus Presiden. Bagi orang tua Wawan (korban Semanggi 1) yang berpendidikan S1 dengan kondisi ekonomi baik, tawaran tersebut tidak lebih dari siasat Negara untuk tidak akan mengusut tuntas kejahatan HAM masa lalu, pemahaman berbeda justru muncul dari keluarga korban Tragedi Talangsari Lampung, yang pada umumnya berprofesi sebagai petani dengan pendapatan rendah, mereka menyatakan siap menjajaki proses rekonsiliasi dengan pertimbangan uang santunan yang diberikan oleh Negara. Belajar dari fakta di atas, betapa tingkat intelektual dan status ekonomi para individu-individu dalam gerakan kolektif memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap konsistensi tujuan dan sasaran gerakan.

Kedua, heterogenitas kasus-kasus yang diusung. Tidak bisa dihindari bahwa seorang korban/satu keluarga korban kejahatan HAM tidak akan mampu berjuang sendiri dalam jangka waktu lama tanpa dukungan sesama korban/keluarga korban lain yang mengorganisir diri karena kesamaan sejarah. Sejak pertama kali mereka membulatkan tekad untuk bergerak bersama, saat itulah konsekuensi berupa egoisitas kepentingan pribadi/kelompok terhadap target capaian gerakan muncul secara bersamaan. Memang di atas permukaan, organisasi gerakan tampak solid dan teguh dengan cita-cita bersama, tapi bagi para pejuang HAM masa lalu yang bergerum di lapangan, kenyataan dapat berkata lain.

Mereka sangat rentan terkooptasi oleh capaian-capaian alternatif yang ditawarkan oleh Negara saat sebagian dari mereka kehilangan asa dengan tujuan utama gerakan: ada yang menghendaki penyelesaian melalui pengadilan HAM ad hoc, melalui KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi), proses hukum cukup pada Peradilan Koneksitas atau Peradilan Militer, lewat jalan damai/ganti rugi, atau setuju dibiarkan menggantung dan akhirnya terlupakan oleh sejarah. Pada kondisi tertentu, kondisi yang mengancam eksistensi gerakan itu dapat membawa fase ideologisasi dan capaian target gerakan bisa saling bersimpang jalan.

Belum lagi pertimbangan kondisi psikologi pelaku aksi (mantan korban kejahatan HAM yang tidak lagi memosisikan diri sebagai korban kejahatan HAM) dan hal-hal teknis (faktor tempat tinggal, membagi waktu dengan bekerja mencari nafkah) turut memberi dampak negatif

¹⁰ Lihat dokumentasi pribadi Arief Priyadi, "Perihal Aksi Diam Setiap Kamis", di sana disebutkan bahwa ketimpangan derajat hidup antar partisan masih menjadi hambatan dalam gerakan mereka, tidak hanya dalam aksi Kamisan, tapi juga periode-period gerakan sebelumnya.

terhadap proses konsolidasi gerakan kolektif. Tidak hanya itu, Negara entah secara sengaja atau tidak, melalui elit-elit politiknya yang cenderung melakukan stigmatisasi “anti persatuan dan kesatuan nasional” terhadap korban/keluarga korban yang sangat sulit diarahkan untuk berdamai dengan mantan petinggi militer pernah membuat getir pejuang sipil HAM dan memaksa mereka berpikir ulang untuk tetap menggunakan aksi-aksi kolektif banalitasnya sebagai instrumen perjuangan. Kelak, kebuntuan tindakan progresif yang datang dari individu-individu inilah yang mengilhami pergeseran bentuk aksi banalitas ke gerakan simbolik di depan Istana Negara, meskipun dalam aksi simbolik Kamisan tantangan-tantangan serupa masih bisa ditemukan.

b. Ketiadaan Pemimpin Gerakan yang Berpengaruh secara Politis

Meminjam argumen McCharthy dan Zald (dalam Haryanto, dkk, 2003: 13) untuk pemilihan pemimpin gerakan, pemimpin gerakan merupakan individu yang berada pada pusat lingkaran gerakan yang meluangkan waktu dan tenaga untuk mengarahkan organisasi dan aktivitas gerakan secara penuh. Individu ini juga yang memposisikan diri sebagai wakil gerakan dalam berhadapan dengan khalayak dan media massa serta dalam hal mewujudkan tercapainya tujuan gerakan. Tidak tanggung-tanggung, target dalam aksi-aksi yang bernuansa penuntasan kasus-kasus HAM di Jakarta jelas menyasar kepada Presiden dan lembaga-lembaga Negara.

Itu berarti para korban/keluarga korban dan LSM sedang menuntut *political will* dari pemimpin politik tertinggi, bukan perkara mudah untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Terlebih jika mempertimbangkan cita-cita gerakan yang di akhir skenarionya ingin dapat melihat para mantan petinggi militer diseret ke pengadilan terbuka, seharusnya kekuatan yang jadi sandaran dari cita-cita mereka adalah kekuatan politik juga, salah satunya dengan memilih pemimpin gerakan yang memiliki pengaruh politis di depan rezim penguasa. Pemimpin politis-kharismatik dalam sebuah gerakan tidak hanya dibutuhkan untuk menjamin tuntutan mereka akan diperhatikan oleh rezim penguasa, tapi juga menjadi alasan untuk menggalang dukungan politik yang lebih besar, dengan demikian dapat mempermudah proses konsolidasi pencapaian sasaran/tujuan gerakan.

Sayangnya, nilai-nilai ideal dalam hubungan antara pengaruh pemimpin gerakan terhadap kebijakan rezim penguasa, tidak tergambar dalam skema perjuangan mereka. Pemimpin gerakan di setiap aksi lapangan hanya dari kalangan korban/keluarga korban, aktivis, mahasiswa dan kelompok-kelompok LSM. Peran secara individual seperti Maria Katarina Sumarsih dan Mugiyanto (korban penculikan Mei 1998 dan koordinator IKOHI) sebagai simpatisan sekaligus pemimpin gerakan memberi kesan semangat juang yang sangat militan, mereka mampu melakukan aksi dan yakin dengan pencapaian tujuan utama gerakan tanpa dituntun oleh pemimpin kharismatik. Bagai pungguk merindukan bulan, kian sulit mendesak Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pembentukan HAM ad hoc, sementara tujuan gerakan semakin terabaikan karena gerakan kolektif mereka tidak memiliki pengaruh politik di depan rezim penguasa.¹¹

c. Mobilisasi Massa yang Rendah

Kendala terbesar selanjutnya adalah tantangan dalam memobilisasi massa. Dalam wacana gerakan sosial, massa dikenal dalam istilah *transitory teams* → adalah individu-individu yang berpartisipasi dalam gerakan secara paruh waktu (*part time*), di mana kelompok ini mengambil

¹¹ Saat keterangan ini digali, informan sempat bingung dalam menjawabnya, menunjukkan sama sekali mereka tidak memiliki kekuatan politik. Informan mengakui hanya meminta nasihat dari pendeta tentang apa-apa yang harus dilakukan, dan secara tidak langsung menempatkan pendeta sebagai pemimpin gerakan. Selama proses perjuangan berlangsung, JSKK hanya beberapa kali saja menemui orang-orang berpengaruh di Republik, misalnya mantan Ketua Umum Muhammadiyah Syafii Ma'arif untuk meminta dukungan moril dan politik, namun janji tinggal janji, organisasi yang dipernah dinaunginya justru mendukung petinggi militer di bursa Capres 2014.

peran sebagai *second liner* dalam gerakan dan *conscience constituency* → kelompok individu ini diidentifikasi sebagai mereka yang secara sukarela memberikan dukungan keuangan kepada gerakan, menandatangani petisi dan ikut menciptakan suasana yang menguntungkan bagi gerakan. Tantangan ini terbilang sulit bagi para korban/keluarga korban, karena pada umumnya yang tertarik dengan isu penuntasan HAM hanya dari kalangan tertentu saja: mahasiswa, aktivis, dan LSM penggiat HAM.

Masyarakat pada umumnya tidak tertarik dengan permasalahan-permasalahan masa lalu, apalagi jika berbau militer dan rezim Soeharto. Masyarakat memposisikan korban kejahatan HAM berat masa lalu bagian dari tumbal politik, korban jiwa dari kekerasan di kerumunan massal. Mereka menilai apa yang diperjuangkan oleh korban/keluarga korban tidak akan pernah bisa mengembalikan nyawa orang yang meninggal dan menghadirkan orang yang sudah hilang. Pemahaman seperti ini menunjukkan betapa isu HAM masih menjadi barang baru di kalangan masyarakat Indonesia luas, terlalu menyia-nyiakan energi bagi mereka untuk menggugat sejarah masa lalu yang tidak ada korelasinya dengan kehidupan mereka hari ini. Ada jalan lain untuk memobilisasi massa, yaitu dengan kekuatan modal materi.

Namun yang jadi hambatan terbesar para pejuang HAM sipil ini adalah sebagian besar dari mereka berasal dari kelas sosial menengah ke bawah, pun dengan keberadaan LSM-LSM yang ikut mengawal perjuangan penuntasan kejahatan HAM, mereka bukan LSM yang berdana operasional “dollar”. Rasa-rasanya mereka tidak akan mampu menggelontorkan modal mahal untuk memobilisasi massa dalam jumlah besar dan massif guna menekan Presiden mengeluarkan keputusan politik pembentukan HAM ad hoc. Sehingga azas solidaritas, kepedulian dengan nasib korban kejahatan HAM oleh Negara, simpati dengan kegigihan perjuangan, dijadikan alasan-alasan klasik untuk memobilisasi massa, dan lagi-lagi tidak membawa kemajuan dalam proses pengusutan.

Faktor Eksternal

Di samping konsekuensi keadaan di dalam gerakan, ada pula faktor penyumbang kegagalan aksi banalitas yang datang dari pihak luar. Dalam banyak kasus di Indonesia, pihak yang berada di luar gerakan memegang peranan penting atas keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran gerakan, posisi strategis dari pihak di luar gerakan terletak pada kemampuannya untuk menyebarkan informasi (mempolitisasi isu) sehingga menarik perhatian dan dukungan dari segenap lapisan masyarakat nasional dan internasional.

a. Perhatian Dari Media Massa

Sesuai dengan koridornya jika media massa mengangkat wacana yang objektif dan turut membantu perjuangan kelompok masyarakat yang tersubordinasikan untuk mendapatkan hak-hak mendasarnya, seperti kebenaran dan keadilan. Namun yang terjadi di Indonesia, khususnya perhatian atas korban/keluarga korban kejahatan HAM berat masa lalu mengalami kemunduran. Media massa terjebak dalam industri kapitalisme, mengangkat sebuah berita/isu yang dapat dijual kepada publik demi meraup keuntungan materi, jebakan industrialis media seperti ini memungkinkan terjadinya manipulasi berita atau dengan sengaja mengabaikan substansi masalah karena para pemilik media telah berafiliasi politik dengan rezim penguasa.

Pun apabila media massa melakukan peliputan terhadap aksi-aksi perjuangan korban/keluarga korban pelanggaran HAM, jauh dari pengaruh revolusioner karena sorotan tidak berlangsung secara terus-menerus dan teratur, isu HAM lenyap begitu saja ditelan berita yang lebih aktual dan menjual. Media massa tidak ikut ambil bagian dalam strategi gerilya. Kecenderungan politisasi dari media massa atas isu HAM muncul pada saat-saat tertentu saja, itu pun karena

pemilik modal media yang berafiliasi dengan rezim penguasa menginginkan isu HAM tersebut dapat menjegal lawan politik dalam arena pemilihan jabatan publik.

Strategi penyebaran informasi dan politisasi isu yang dilakukan dengan sangat cerdas oleh para the Mothers di Argentina tidak dapat diikuti oleh para korban/keluarga korban pelanggaran HAM berat di Indonesia. Di Argentina, manakala media massa dikuasai oleh pemilik modal yang berafiliasi politik dengan rezim penguasa, mereka menggalang dana dan dukungan untuk mendokumentasikan semua aksi-aksinya, lalu melakukan penyebaran informasi secara mandiri. Kasus di Indonesia, korban/keluarga korban pelanggaran HAM oleh Negara justru sangat tergantung dengan eksistensi media massa, gerakan perjuangan seperti kehilangan ruh saat media massa berhenti menaruh perhatian pada mereka.

b. Menjual Aib

Sejak jatuhnya rezim Soeharto di mana isu HAM menjadi sorotan internasional, lembaga-lembaga internasional yang mengklaim diri sebagai lembaga non-profit berbondong-bondong membangun jaringan dengan LSM nasional. Salah satu lembaga internasional yang rajin membangun relasi dengan organisasi korban/keluarga korban adalah ICTJ (*International Center for Transitional Justice*). Organisasi internasional yang berpusat di New York ini menjalin kerjasama yang sangat erat dengan KontraS, IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia), JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan) dan KKPK (Koalisi Keadilan dan Pengungkap Kebenaran).

Kerjasama yang erat dan intens antara lembaga internasional dan nasional yang terjalin sejak tahun 2001 hingga sekarang nyatanya tidak menjanjikan dukungan dan kemudahan bagi korban/keluarga korban kejahatan HAM untuk mendesak Presiden mengeluarkan Keppres tentang pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Di tangan mereka, kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dijadikan proyek berkelanjutan dengan tujuan utama penelitian dan publikasi, wajah-wajah korban/keluarga korban terpampang jelas pada *cover* publikasi, menggadaikan nasib mereka untuk dijadikan contoh buruk penegakan HAM di dunia internasional, atau untuk penghargaan yang lebih tinggi, mereka mengundang para korban/keluarga korban untuk menjadi pembicara di seminar-seminar tentang penegakan HAM.

Gerakan Melawan Lupa

Sasaran/tujuan dalam aksi Kamisan sebagai upaya menjaga ingatan publik –terutama elit politik— tidak serta merta menanggalkan cita-cita akhir mereka, yaitu mendesak Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pembentukan HAM ad hoc. Gerakan melawan amnesia merupakan konsekuensi samping yang melekat dari semua bentuk perjuangan aksi Kamisan. Justru semangat melawan lupa dalam gerakan aksi Kamisan ini dapat membantu tercapainya sasaran/target utama gerakan. Publik tidak akan lupa dengan persoalan HAM jika aksi Kamisan terus berjalan secara teratur dan konsisten dengan sasaran/target utamanya, tapi sebaliknya, publik tidak akan menaruh perhatian pada persoalan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang masih saja menggantung andai saja aksi Kamisan hanya sebatas aksi spontan, tanpa keteraturan waktu, dan dengan tidak menggunakan simbol-simbol seperti selama ini.

Pada ranah retoritik, kecenderungan lupa pada manusia atas suatu peristiwa telah diurai oleh penulis Perancis, Michael de Montaigne. Baginya, manusia dibekali seperangkat kemampuan untuk mengingat peristiwa yang telah lama terjadi, sekaligus membawa kembali kesan, pengalaman dan pemaknaan yang dinamis dari sesuatu yang pernah dialaminya. Dalam pandangan psikologi sosial, terminologi ingatan merujuk pada sesuatu hal yang tidak bisa sepenuhnya hilang, melainkan tetap

menyisakan bekas di jiwa dan apabila dibutuhkan, maka ia dapat dimunculkan kembali (Sosiawan, 2005:4). Mengutip pandangan Montaigne yang sangat terkenal terkait konsep ingatan, ingatan memberi tahu kepada kita bukan apa yang kita pilih, tetapi apa yang menyenangkan kita (dalam Grayling, 2001:182).¹²

Seperti dua sisi dari koin yang sama, ingatan pada diri manusia selalu berhadapan dengan kontradiksi berupa kecenderungan untuk melupakan peristiwa yang pernah dialaminya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Plutarch, lupa dapat menggiring seseorang meninggalkan kesan dan pengalaman atas suatu peristiwa menjadi sesuatu yang bukan peristiwa. Dari sana, konsep lupa dapat diartikan sebagai hal yang akan mereduksi esensi dari peristiwa itu sendiri (dalam Grayling, 2001:182).¹³ Terry Eagleton lewat analisa *The Politics of Amnesia* dalam "After Theory" (2003) juga mengamini kedua pemikir di atas. Dalam perspektif budaya, dengan bahasa yang lebih tajam dia membahasakan kelupaan atas suatu peristiwa politik tampaknya lebih disebabkan oleh peralihan generasi yang turut mempengaruhi antusiasme generasi baru untuk melihat dinamika yang terjadi pada generasi sebelumnya, sehingga tidak ada ide untuk menelaah dan melakukan penelusuran ulang sejarah masa lalu.

Apa yang ia sebut dengan aliran postmodernisme memiliki pengaruh negatif terhadap ingatan manusia, dengan menaruh keprihatinan terhadap redup dan bangkitnya rezim-rezim otoriter namun tidak dibarengi oleh gagasan hidup secara kolektif. Lebih lugas lagi, kondisi ini diperparah dengan *the absence of political action* untuk membangkitkan kesadaran kolektif, dan oleh karena itu perlu adanya keterlibatan pelaku sejarah untuk membedah kembali persoalan masa lalu dalam konteks kekinian.

D. Penutup

Ada beberapa temuan data yang dapat dijadikan argumen untuk menjawab pertanyaan penelitian di bab awal. *Pertama*, aksi Kamisan tidak hadir begitu saja tanpa ada kondisi pemantik, serangkaian perjuangan aksi yang mendahuluinya, dan faktor-faktor lain penyebab munculnya aksi simbolik ini. Dari kondisi yang ada, para pelaku aksi Kamisan menganggap aksi simbolik ini sebagai bentuk akumulasi kekecewaan terbesar kepada rezim penguasa. Lahirnya metode perjuangan alternatif Kamisan karena walaupun kekuatan Orde Baru berakhir, rezim penguasa di era demokratis sengaja menutup mata dan telinga untuk tidak peduli dengan tuntutan mereka manakala penyampaian gagasan melalui bentuk aksi banalitas. Oleh karena itu, aksi simbolik yang dilakoni secara sederhana, berbeda, konsisten, dan teratur masih menjadi cara militan dalam perjuangan penuntasan kejahatan HAM masa lalu.

Kedua, kekecewaan tersebut muncul karena itikad penuntasan kasus kejahatan HAM masa lalu oleh Negara jalan di tempat dan hanya menghasilkan kebijakan basa-basi. Undang-undang yang sedianya dapat mempercepat penuntasan kasus hanya menumpuk layaknya arsip nasional usang. Padahal, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diperkuat oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sudah sangat kuat dijadikan rujukan sebagai dasar hukum dan mengatur hal teknis untuk menjerat para petinggi-petinggi militer di era transisi demokrasi ke pengadilan umum, seperti yang diterapkan di Argentina. Sebuah paradoks ketika mantan petinggi militer Indonesia justru dengan leluasa maju di bursa pemilihan Presiden dari periode ke periode.

¹² Menjadi kutipan dalam Evaluasi 2 Tahun Aksi Diam Hitam Kamisan, *Gerakan Kultural Politik Melawan Lupa*. Evaluasi aksi Kamisan kedua tersebut diadakan di Jakarta.

¹³ *Ibid.*

Ketiga, ketidakajegan dari proses lahirnya kedua undang-undang tersebut dengan kenyataan hari ini diperparah oleh ketiadaan *political will* dari lembaga-lembaga tinggi Negara, barang tentu juga Presiden RI. Dengan demikian, dalam rangka mendorong Presiden mengeluarkan Keputusan politiknya perihal pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dan memantik kerja yang lebih serius dari lembaga tinggi Negara terkait, perlu digalakkan gerakan kolektif yang berisikan sindiran-sindiran sebagai bentuk perlawanan secara halus dengan menggunakan atribusi dan simbol dalam gerakan. Konsistensi dan keteraturan waktu atas aksi yang berlangsung juga diperlukan untuk menjaga ingatan elit-elit politik dengan tanggung jawab mereka dalam penuntasan kejahatan HAM masa lalu.

Keempat, telah terjadi pergeseran dimensi kekuasaan dalam skema rantai penuntasan kasus-kasus HAM berat masa lalu. Dari dimensi hukum ke dimensi politik. Celaknya dimensi politik tidak membuka pintu perubahan yang lebih menjanjikan, sebaliknya, proses menjadi berbelit-belit dan tidak kunjung menemui babak akhir. Semestinya, jika proses penuntasan kejahatan HAM dilakukan dalam ranah hukum, tidak akan pernah hadir aksi Kamisan, karena dari hasil investigasi Komnas HAM lewat KPP-HAM sebagai penyelidik sudah membeberkan fakta dan bukti bahwa memang terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Kelima, sasaran aksi Kamisan sebagai upaya melawan kecenderungan lupa dengan permasalahan HAM hanyalah target sampingan. Sejak jatuhnya rezim Soeharto sampai menjelang Pemilu 2014 ini, dengan berbagai bentuk gerakan sebelumnya, sasaran mereka tetap sama: mendorong Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pembentukan Pengadilan HAM ad hoc, yang dengannya dapat menyeret para pelaku penjahat kemanusiaan ke ranah hukum. Aksi Kamisan yang mulai diadakan secara masif dan terorganisir di berbagai kota besar di Indonesia berbeda dengan aksi Kamisan Maria Katarina Sumarsih, dkk di depan Istana Negara. Metode penyampaian gagasan, atribusi, dan simbol yang dipakai dalam gerakan boleh saja sama, namun sasaran utama gerakan tidaklah sama. Pengamatan terhadap aksi Kamisan Yogyakarta sama sekali tidak menyinggung pembentukan pengadilan HAM ad hoc, mereka hanya menyuguhkan gerakan kolektif sebagai agen penyebar informasi dari kelompok-kelompok minoritas.

Hal kedua yaitu refleksi teoritik penelitian dengan data di lapangan. Bagaimana melacak operasionalisasi strategi perlawanan dalam konsep *weapon of the weaks* James C. Scott, pembacaan terhadap teori perkembangan gerakan kolektif Neil J. Smelser dan *RMT* Charles Tilly di dalam aksi Kamisan? *Pertama*, strategi perlawanan dalam konsep yang digagas oleh James C. Scott secara keseluruhan dapat menjelaskan strategi perlawanan Maria Katarina Sumarsih, dkk. Dari pandangan Scottian, cara menghunus perlawanan kepada rezim penguasa tidak harus secara terang-terangan, tidak perlu melakukan *show off force*, bahkan terlalu berlebihan jika harus mengorbankan nyawa. Dalam tindakan dan aktifitas normal, atau di suasana kepatuhan kepada orde penguasa, sikap membangkang yang ditunjukkan oleh pihak-pihak tertentu masih dengan mudah dapat ditemui. Aksi militan yang lambat laun, entah datang dari luar atau dalam, akan mengubah tatanan sosial yang sudah mapan sebelumnya.

Inilah yang terekam dalam aksi Kamisan. Semangat memperjuangkan keadilan memaksa para pelaku aksi Kamisan menerapkan strategi gerilya gagasan, berharap apa yang terjadi di Argentina menjalar ke Indonesia. Aksi Kamisan sebagai bentuk gerakan yang mendorong Presiden mengeluarkan keputusan politik pentingnya untuk menyudahi mata rantai penuntasan kasus-kasus kejahatan HAM berat masa lalu, tidak dapat disejajarkan dengan aksi perlawanan banalitas.

Penggunaan simbol-simbol dan bahasa tubuh dari para pelaku Kamisan saat melangsungkan aksi, sarat dengan makna perlawanan dan sindiran kepada rezim penguasa, mereka memindahkan perihai kekecewaan dan kebuntuan tindakan progresif ke dalam bentuk aksi teatrikal diam dan berdiri di depan Istana Negara. Menegaskan mereka tetap ada, melawan keabaian Negara dengan tuntutan mereka, meski tak berucap lantang membuat bising telinga. Tidak perlu memikul senjata dan mengangkat spanduk lebar, hanya dibutuhkan konsistensi dan keteraturan waktu untuk sedikit demi sedikit menggerus pondasi bangunan impunitas bagi penjahat HAM masa lalu.

Walaupun aksi mingguan seringkali luput dari amatan media yang sudah terkontaminasi paham pasar dan dimiliki konglomerat yang berafiliasi dengan penguasa, mereka tidak patah arang. Di luar aksi Kamisan, mereka juga melakukan advokasi untuk menanamkan nilai-nilai perlindungan dan penegakan HAM di tataran gagasan para pelajar SMP/SMA dengan menerbitkan panduan bahan ajar sejarah berwawasan HAM. Sebuah upaya untuk mengurangi kapasitas sentral Negara yang gagal melakukan ideologisasi wacana HAM di Indonesia.

Pengamatan penulis, strategi perlawanan ala James C. Scott mengalami modifikasi lewat studi kasus aksi Kamisan, Scott hanya meneropong pergulatan masyarakat kelas sosial bawah dengan kelas sosial atas dalam menjelaskan bentuk-bentuk pembangkangan terhadap kebijakan yang tidak memihak kepada kaum petani, Scott tidak memberi ruang kecurigaan yang cukup pada masyarakat kelas menengah, seperti Maria Katarina Sumarsih, dkk. Sehingga potongan pertanyaan apakah memang demikian adanya bahwa pelaku aksi Kamisan diasumsikan (dengan meminjam istilah James C. Scott) sebagai orang-orang yang kalah? Ataukah mereka orang yang setengah kalah, lalu mampu menggunakan saluran-saluran gerakan perlawanan alternatif lain (bahkan ikut menumpang dalam struktur Negara) untuk mencapai sasaran utama gerakan, menjadi tidak terjelaskan secara utuh.

Untuk itu, teori perkembangan aksi kolektif Neil J. Smelser menutupi kelemahan teori James C. Scott. Perkembangan aksi kolektif menguraikan cerita apa selanjutnya yang terjadi saat sekelompok orang mulai merasa tidak puas dengan kondisi yang ada, namun masih mengalami kebuntuan. Walaupun ingin melawan, cara perlawanan dilakukan dengan cara-cara yang sederhana, tidak terorganisir dan tidak memiliki daya dorong perubahan yang besar. Neil J. Smelser menguraikannya lebih jauh dalam teori perkembangan aksi kolektif.

Jejak operasionalisasi teori Charles Tilly dapat telusuri dari suasana ketegangan/konflikual (*contentious*) antara Negara dan korban/keluarga korban kejahatan HAM berat masa lalu. Ada tanggung jawab politik dari seorang Presiden yang belum terbayarkan kepada pelaku aksi Kamisan, dan itu tetap terus mereka perjuangkan. Penulis mengakui, sekali pun sikap frontal dan pembangkangan gagasan kepada rezim penguasa secara terang-terangan tidak (atau jarang sekali) terjadi.

Ketegangan pada tataran emosional dari para korban/keluarga korban kejahatan HAM dalam aksi Kamisan tetap saja ada, begitu juga dengan para elit politik yang memahami akar permasalahan, mereka menilai aksi diam dan berdiri di depan Istana Negara merupakan bentuk akumulasi kekecewaan terbesar pada Negara. Mengutip gagasan Charles Tilly dalam studi *Dynamics of Contention* (2004), ketegangan antara kelompok masyarakat dengan Negara biasanya berlangsung lama dan berkelanjutan sebagai bentuk komunikasi atas gagasan/tuntutan yang ditujukan kepada Negara.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian sasaran/target utama dari sebuah gerakan sosial, mutlak dibutuhkan tenaga untuk menghimpun seluruh modal dan kekuatan dari kelompok

penentang, saat itulah teori mobilisasi sumberdaya sedang dipraktekkan. Dalam studi kasus aksi Kamisan, variabel-variabel *RMT* dapat ditemui dari seberapa besar dukungan (baik materi dan non-materi) pihak-pihak yang memiliki pandangan yang sama dengan para pelaku aksi Kamisan untuk melakukan ideologisasi wacana HAM sebagai suatu sistem nilai yang dominan dan mulai memiliki makna emosional yang kuat bagi seseorang atau sekelompok orang.

Dengan begitu, dalam konteks ketegangan antara suatu kelompok penentang dengan Negara yang ditumbuh-suburkan dengan menggejalanya *RMT*, dan melewati serangkaian proses penyampaian gagasan pada akhirnya akan membawa masuk pada fase evaluasi pencapaian. Sayangnya, aksi Kamisan belum memasuki fase evaluasi pencapaian karena sedang dan akan tetap berlangsung entah sampai kapan.

Terakhir, kata kunci relevansi teoritik Charles Tilly adalah politisasi. Seluruh tenaga, pikiran dan perhatian para pelaku aksi simbolik Kamisan terfokus pada proses politisasi isu penuntasan kejahatan kemanusiaan HAM berat masa lalu. Mengubah kanalisasi pandangan masyarakat yang melihat kejahatan HAM masa lalu sebagai permasalahan segelintir orang untuk menjadi sebuah pandangan bersama atas potensi bahaya kemanusiaan yang dapat mereka alami juga sewaktu-waktu. Seluruh jerih payah dalam upaya itu dimaksudkan untuk menekan dan mendesak Negara untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc.

Daftar Pustaka

- Bejarano, Cynthia. 2006. *Las Super Madres de Latino America: Transforming Motherhood by Challenging Violence in Mexico, Argentina and El Salvador*. *Frontiers: A Journal of Women Studies* 23(1), dalam Rachel Koepsel. 2011. Case-Specific Briefing Paper, Humanitarian Assistance in Complex Emergencies. University of Denver.
- Boudreau, Vincent. 2004. *Resisting Dictatorship, Repression and Protest in Southeast Asia*. New York: Cambridge University Press.
- Eagleton, Terry. 2003. *The Politics of Amnesia* dalam *After Theory*. Penguin Books.
- Grayling, A.C. 2001. *The Meaning of Things*. Great Britain, Phoenix Paperback.
- Haryanto, dkk. 2003. *Gerakan Sosial Politik*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan, Departemen Dalam Negeri.
- Herdiansyah, H. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Jenkins, J. Craig. 1983. *Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movement*. New York: Columbia University Press.
- Kartodirdjo, Sartono. 1973. *Protest Movements in Rural Java*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, Oxford University Press/P.T. Indira.
- Klandermans, Bert. 2005. *Protes dalam Kajian Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Navarro. 1989. "The Personal is Political: Las Madres de Plaza de Mayo." *Power and Popular Protest. Latin American Social Movements* . Ed. Susan Eckstein, diakses dari http://serendip.brynmawr.edu/sci_cult/courses/knowbody/f04/web2/grodriguez.html
- Padawangi, Rita. 2011. *Reform, Resistance, and Empowerment: The Transformation of Urban Activist Groups in Jakarta, Indonesia, 1998-2010*. Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore.
- Plath, W. David, George Rude, Arthur M.S Sr, Raymond Alvon, Michael Lewis, and Ir. Soekarno. 2001. *Gerakan Melawan Penindasan, dari Protes, Reformasi, sampai Pembebasan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Kendi.

- Scott, James C. 1994. *Moral Ekonomi Petani (translate ed)*. Jakarta: LP3ES
- _____. 2000. *Senjatanya Orang-orang Yang Kalah: Bentuk-bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Smelser, Neil J. 1971. *Theory of Collective Behavior*. New York: The Free Press.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian . 1989. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES.
- Soares, de Jesus Aderito, Alexander Supartono, Amiruddin, Irwan Firdaus, Muhammad Fauzi, and Togi Simanjuntak. 1997. *1996: Tahun Kekerasan, Potret Pelanggaran HAM di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Sumarsih, Maria Katarina, dkk. 2011. *Payung Hitam Keadilan*. Jakarta: Peace Woman Across the Globe Indonesia, KontraS dan Aliansi Jurnalis Indonesia.
- Tarrow, Sydney. 1994. *Power in Movement. Social Movement, Collective Action and Mass Politics in the Modern State*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Taylor, Diana. 1997. "Trapped in Bad Scripts: The Mothers of Plaza de Mayo". *Disappearing Acts: Spectacles of Gender and Nationalism in Argentina's "Dirty War"*. Durham, NC: Duke UP, penjelasan lebih jauh dapat dilihat Dalam http://serendip.brynmawr.edu/sci_cult/courses/knowbody/f04/web2/grodriguez.html
- Tilly, Charles. 1996. *Contentious Politics and Social Change*. Dalam makalah yang dipresentasikan pada workshop tentang *Social Movement in South Africa*, Durban.
- Wilson, John. 1973. *Introduction to Social Movements*. New York: Basic Books, Inc.
- Yin, P.D. 2013. *Studi Kasus "Desain dan Metode"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Jurnal:
- David S. Meyer and Nancy Whittier. 1994. *Social Movement Spillover*, Vol. 41, No. 2 (May), 277-298. University of California Press.
- Harry H. Hiller. 1975. *A Reconceptualization of the Dynamics of Social Movement Development*, Vol. 18, No. 3 (July), 342-360. University of California Press.
- Jay Ulfelder. 2005. *Contentious Collective Action and the Breakdown of Authoritarian Regimes*, Vol. 26, No. 3, 311-334. International Political Science Review.
- Rachel Koepsel. 2011. Case-Specific Briefing Paper, Humanitarian Assistance in Complex Emergencies. University of Denver.
- Dokumen
- Dokumen bersama antara KontraS, IKOHI, JSKK, ICTJ (International Centre for Transitional Justice), Jakarta 16 April 2009. Dokumen ini dibuat saat kunjungan sebagian para the Mothers ke Jakarta.
 - Disampaikan pada acara kursus HAM untuk Pengacara yang diselenggarakan oleh ELSAM pada tanggal 18 Juni 2007, data didapatkan dari KontraS.
 - Evaluasi 2 Tahun Aksi Diam Hitam Kamisan, *Gerakan Kultural Politik Melawan Lupa*.

Link Website:

- <http://www.thejakartapost.com/news/2011/03/11/%E2%80%98times-president-has-ignored-us%E2%80%99.html>, akses Desember 2013.
- <http://www.ucanews.com/news/an-indonesian-mothers-long-fight-for-justice/68373>, akses pada Desember 2013.
- <http://www.thejakartaglobe.com/editorschoice/for-indonesias-kamisan-the-demand-and-wait-for-justice-only-grows/518500>, akses Desember 2013.
- BBC News - Argentine Mothers mark 35 years marching for justice <http://www.bbc.com/news/world-latin-america-17847134>, akses April 2014
- Argentina's Mothers of Plaza de Mayo A Living Legacy of Hope and Human Rights <http://truth-out.org/archive/component/k2/item/92458:argentinas-mothers-of-plaza-de-mayo-a-living-legacy-of-hope-and-human-rights>, akses Mei 2014
- Madres de Plaza de Mayo History

<https://webspace.utexas.edu/cmr485/www/mothers/history.html>, akses Juni 2014

- Madres of the Plaza de Mayo (Women in World History Curriculum)
<http://www.womeninworldhistory.com/contemporary-07.html>, akses Juni 2014
- Mothers Go Political Las Madres de Plaza de Mayo
http://serendip.brynmawr.edu/sci_cult/courses/knowbody/f04/web2/grodriguez.html, akses Juni 2014
- Madres de Plaza de Mayo _ Teaching Tolerance
<http://www.tolerance.org/activity/madres-de-plaza-de-mayo>, akses Juni 2014
- BBC News - Argentina marks coup anniversary amid Dirty War trial
<http://www.bbc.com/news/world-latin-america-12832677>, akses Juni 2014
- BBC News - Scandal swirls over Argentine Mothers rights group
<http://www.bbc.com/news/world-latin-america-13598824>, akses Juli 2014